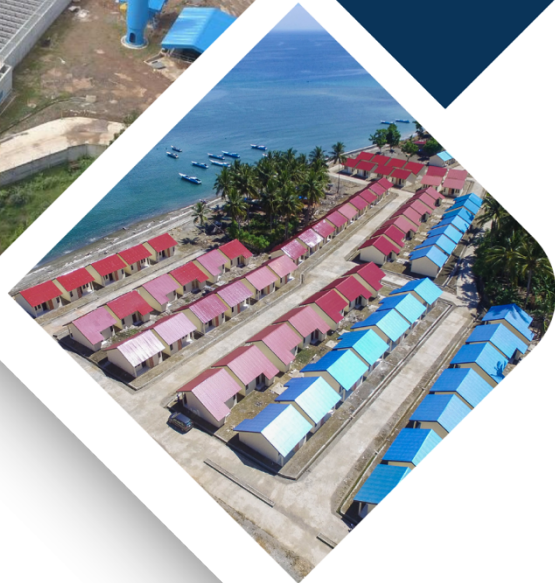


RENSTRA

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN

T A .

2020-2024



KATA PENGANTAR

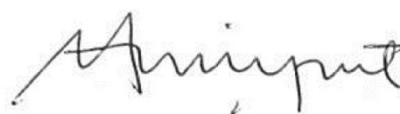
Dalam rangka menindaklanjuti perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan perubahan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung pembiayaan non APBN Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, serta Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu menyusun dokumen revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024. Dokumen ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dokumen tersebut disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 ini mengelaborasi Program Dukungan Manajemen (mengakomodasi kegiatan penyiapan dan transaksi proyek KPBU) dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan). Dokumen ini digunakan sebagai acuan terbaru dalam Menyusun perencanaan tahunan, penetapan kinerja dan penyusunan laporan kinerja serta evaluasi menyeluruh selama lima tahun. Dokumen ini telah dilakukan penyesuaian terhadap target Tahun 2023 dan 2024, mengacu pada evaluasi paruh waktu pelaksanaan Rencana Strategis. Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akan menerjemahkan dokumen tersebut kedalam rencana strategis unit kerja dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Jakarta, 14 Juni 2024

Direktur Jenderal,



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

DAFTAR ISI

.....	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II	9
TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	9
2.1 Tujuan	9
2.2 Sasaran Program	12
BAB III.....	65
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	65
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	65
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	82
3.3 Kerangka Regulasi	86
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	87
BAB IV	101
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	101
4.1 Target Kinerja.....	101
4.2 Kerangka Pendanaan	102
BAB V	105
PENUTUP.....	105
LAMPIRAN	106
Lampiran 1 Arah Kerangka Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	107
Lampiran 2 Matriks Program, Kegiatan, dan Pendanaan.....	117
Lampiran 3 Indikasi Proyek KPBU	135
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	135

DAFTAR GAMBAR

1.1 Target Visum Pupr Tahun 2020-2024 dan 2030	3
1.2 Gap Funding Visium Tahun 2020 – 2024.	4
2.1 Cascading Program Dan Kegiatan DJPI TA. 2020-2024	14
3.1 Redesain Program Kementerian PUPR.....	47
3.2 Kerangka Kelembagaan.	50

DAFTAR TABEL

2.1 Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Cara Perhitungan.....	15
3.1 Kontribusi Kementerian Pupr Dalam Major Project RPJMN 2020-2024.	36
3.2 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2019.....	58
3.3 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin.	58
3.4 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2019 Berdasarkan Jenjang Pendidikan. ..	59
3.5 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2019 Berdasarkan Jabatan .	
4.1 Tujuan Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja DJPI Tahun 2020-2024.....	60
4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan DJPI 2020-2024 Per Unit Kerja (Rp. Juta)	61
4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan DJPI TA. 2020-2024 Per Program (Rp.Juta).	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan konektivitas ruang yang berdampak pada kemudahan akses terhadap sumber daya sehingga perekonomian nasional dan daya saing bangsa dalam persaingan global dapat meningkat. Berdasarkan IMD Global Competitiveness Index di tahun 2023, Indonesia naik ranking dari 44 ke-34. Kenaikan peringkat Indonesia ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat. Pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga internasional IMD Competitiveness Center tersebut didasarkan pada empat kriteria, yaitu performa ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Peringkat performa ekonomi Indonesia mengalami kenaikan yang paling signifikan, yaitu 13 peringkat dari sebelumnya 42 ke peringkat 29. Efisiensi bisnis Indonesia naik 11 peringkat dari peringkat 31 ke peringkat 20. Efisiensi pemerintah dari 4 peringkat dari peringkat 35 ke peringkat 31. Sedangkan untuk komponen infrastruktur, Indonesia berada di peringkat 51. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah perlu memberi perhatian lebih kepada sektor infrastruktur karena sektor tersebut saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia, telah melakukan berbagai upaya dan strategi percepatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Selama periode 2015-2019, capaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

- i. **Sumber Daya Air**, yaitu meliputi pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air

lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 meliputi: bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru, embung yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah, 1.005.402 Ha jaringan irigasi baru telah terbangun, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3.021.105 Ha, pembangunan air baku sebanyak 30,70 m³/detik, pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimen dan lahar sebanyak 330 buah dan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali daya rusak air sebanyak 1.485 km.

- ii. **Jalan dan Jembatan**, yaitu capaian 2015-2019 untuk pembangunan jalan dan jembatan baru dengan panjang masing-masing 3.867 km dan 58.346 m. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jalan bebas hambatan sepanjang 1.500 km.
- iii. **Perumahan**, meliputi pembangunan rumah susun sebanyak 48.792 unit, rumah khusus 23.960 unit, rumah swadaya sebanyak 735.856 unit dan bantuan PSU Perumahan 119.612 unit. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2015-2019 sebanyak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.
- iv. **Permukiman**, yaitu pembangunan SPAM sebanyak 21.499,5 lt/detik di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 3.173 lt/detik di tahun 2019. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan penanganan kawasan kumuh sebanyak 23.407 Ha di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 8.815 Ha di tahun 2019.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

- a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun;
- b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle;
- c. 100% Smart Living (Hunian Cerdas).

Pelaksanaan target visium tersebut, tentu tidak terlepas dengan berbagai pendekatan, diantaranya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, dan pengarusutamaan gender. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pengarusutamaan gender diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral

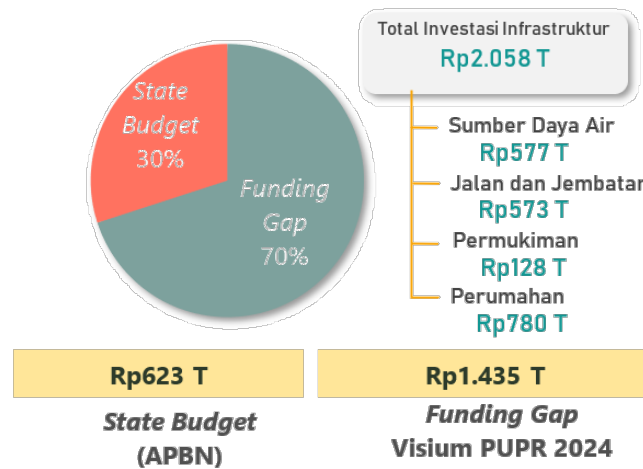
dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Gambar 1.1 Target Visium PUPR Tahun 2020 - 2024 dan 2030



Adapun untuk rencana pembangunan infrastruktur di periode 2020-2024, sesuai Visium Kementerian PUPR 2030, memproyeksikan kebutuhan investasi untuk mendanai kebutuhan infrastruktur selama lima tahun adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Sesuai dengan tren ketersediaan APBN, kebutuhan pendanaan tersebut diproyeksikan tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah dan diperkirakan hanya mampu untuk mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau sebesar Rp 623 Triliun. Sehingga terdapat gap funding untuk penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama lima tahun kedepan.

Gambar 1.2 Gap Funding Visium Tahun 2020 – 2024



Sesuai Renstra Kementerian PUPR, diketahui bahwa pada tahun 2020-2024, alokasi pendanaan APBN hanya mampu mendanai sekitar 43% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp. 889 Triliun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan mendesak, oleh karena itu Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif untuk memenuhi gap funding yang ada. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR melalui Unit Organisasi yang secara khusus menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Amanat untuk penyelenggara pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengingat besarnya gap funding penyediaan infrastruktur yang ada.

Isu strategis lainnya yang dihadapi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu: (1) Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN; (2) Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; (3) Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU; (4) Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU; (5) Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama; (6) Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU; (7) Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN; (8) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK; (9) Ketersediaan lahan yang clear dan clean untuk proyek KPBU, serta (10) Isu-isu strategis yang terkait dengan sektor pembiayaan perumahan yang merupakan domain Unit Organisasi sebelumnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan pembiayaan infrastruktur yang tidak mudah, namun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tetap merasa optimis dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya. Hal ini dikarenakan potensi pembiayaan KPBU yang sangat besar.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Beberapa potensi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah terkait potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta potensi di bidang pembiayaan perumahan. Adapun potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. DJPI ditugaskan sebagai koordinator Simpul KPBU (KEPMEN terbaru);

2. Target penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan cukup tinggi, sedangkan ketersediaan APBN terbatas. Sehingga memerlukan upaya membiayai proyek melalui pendanaan non APBN.
3. KPBU pada proyek Non Jalan Tol masih banyak yang belum terlaksana sehingga potensinya masih sangat besar.
4. Tersedianya peraturan terbaru terkait Tata Kelola KPBU yang mempunyai tujuan mempercepat dan penyederhanaan proses KPBU.
5. Tingginya komitmen Pemerintah untuk menggunakan pendanaan Non APBN.
6. Tersedianya sumber daya manusia di lingkungan DJPI yang memahami dan mempunyai pengalaman pada tahap penyiapan dan transaksi KPBU.
7. Tersedianya beragam aplikasi yang memudahkan pelaksanaan KPBU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun potensi di bidang pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan APBN dalam menangani tingginya kebutuhan rumah, menjadi potensi pengembangan berbagai skema;
2. Kelembagaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang semakin menguat.
3. Rumah tangga yang menghuni Rumah Layak Huni masih cukup rendah yaitu sebanyak 60,66% pada Tahun 2022.
4. Potensi pertambahan Rumah Tangga baru sebesar 720.000-800.000 RT belum sebanding dengan pasokan rumah bersubsidi sebesar 200.000 Unit per tahun.
5. Adanya komitmen Pemerintah untuk memperluas akses terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui perluasan skema, sumber pendanaan dan pengembangan regulasi;
6. Adanya target Major Project Pembangunan Rumah Susun di Perkotaan sebanyak 1.000.000 Unit selama 2020-2024;

7. Terdapat perluasan tugas PT SMF dalam ekosistem pembiayaan perumahan, sehingga potensinya perlu terus dioptimalkan;
8. Terdapat aplikasi pendataan perumahan (HREIS) yang mulai digunakan oleh beberapa pihak untuk sumber Analisa data.

Selain potensi lingkungan strategis, beberapa **permasalahan** yang menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu:

Permasalahan di bidang pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah:

1. Stok infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar 43% dari PDB ini masih di bawah rata-rata negara-negara maju yaitu 70%. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Amerika Serikat 64% sedangkan Cina 76% dan Jerman 71%. Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045;
2. Perencanaan KPBU belum terintegrasi dalam rencana Pembangunan infrastruktur baik jangka menengah maupun jangka Panjang.;
3. Keterbatasan alokasi APBN untuk skema pengembalian investasi berupa AP dan dukungan fiskal Pemerintah terhadap proyek KPBU Unsolicited;
4. Masih banyak stakeholder yang belum memahami skema KPBU;
5. Masih panjangnya/lamanya proses penyiapan proyek KPBU;
6. Skema pembiayaan dan pengembalian investasi KPBU yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan belum menarik bagi pihak swasta;
7. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/pemangku kepentingan dalam tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi KPBU;
8. Belum terdapat unit dalam Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai Paying Agent dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama;

9. Ketidakpastian revenue akibat belum terealisasinya bangkitan dari infrastruktur Program Pemerintah lainnya.
10. Pada beberapa proyek perubahan target wilayah relatif sering terjadi (belum adanya kesepakatan di awal sehingga dapat tercantum pada dokumen kelayakan mengenai kepastian wilayahan penanganan.
11. Perencanaan proyek tidak terintegrasi dari hulu ke hilir.
12. Kompetensi SDM pengadaan BUP KPBU dengan PJPk Pemerintah Daerah yang masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan di bidang Pembiayaan Perumahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan perumahan masih didominasi oleh APBN;
2. Keterbatasan regulasi pendukung penyediaan rumah bagi MBR di daerah dan proses perizinan membutuhkan waktu yang lama;
3. Akses MBR sektor informal masih terbatas terhadap sumber pembiayaan perumahan;
4. Pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi dan optimal sehingga banyak tahapan yang belum efisien;
5. Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah belum efisien dan efektif;
6. Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
7. Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. BP Tapera belum beroperasi secara penuh sehingga gap pembiayaan perumahan dengan ketersediaan dana murah dan jangka Panjang masih sangat tinggi;
9. Supply rumah belum sesuai dengan kebutuhan rumah MBR;
10. Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

2.1 Tujuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa tujuan Kementerian dalam 2020-2024 yang terdiri dari:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu: Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;

- 2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - 3) Kapasitas tampung per kapita;
 - 4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
1. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
 2. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - 2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
 3. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - 2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
 4. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - 2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis;
 - 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS3) dan (SS5), yaitu:

Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - 2) **Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.**
- a. **Sasaran Strategis kelima (SS-5)**, yakni: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:

- 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
- 2) **Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;**
- 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
- 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
- 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Berdasarkan potensi, permasalahan, tantangan lingkungan strategis ke depan, dan keterkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI menetapkan tujuan Unit Organisasi Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Percepatan Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif
2. Peningkatan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

2.2 Sasaran Program

DJPI pada Tahun 2020-2024 akan mengampu 2 program yaitu (1) Program Dukungan Manajemen (Koordinator: Sekretariat Jenderal); dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator: Ditjen Cipta Karya). Dua Program tersebut merupakan program yang digunakan DJPI dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut di-breakdown menjadi Sasaran Program. Sasaran Program (SP) DJPI yaitu:

- 1) **Sasaran Program** Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.

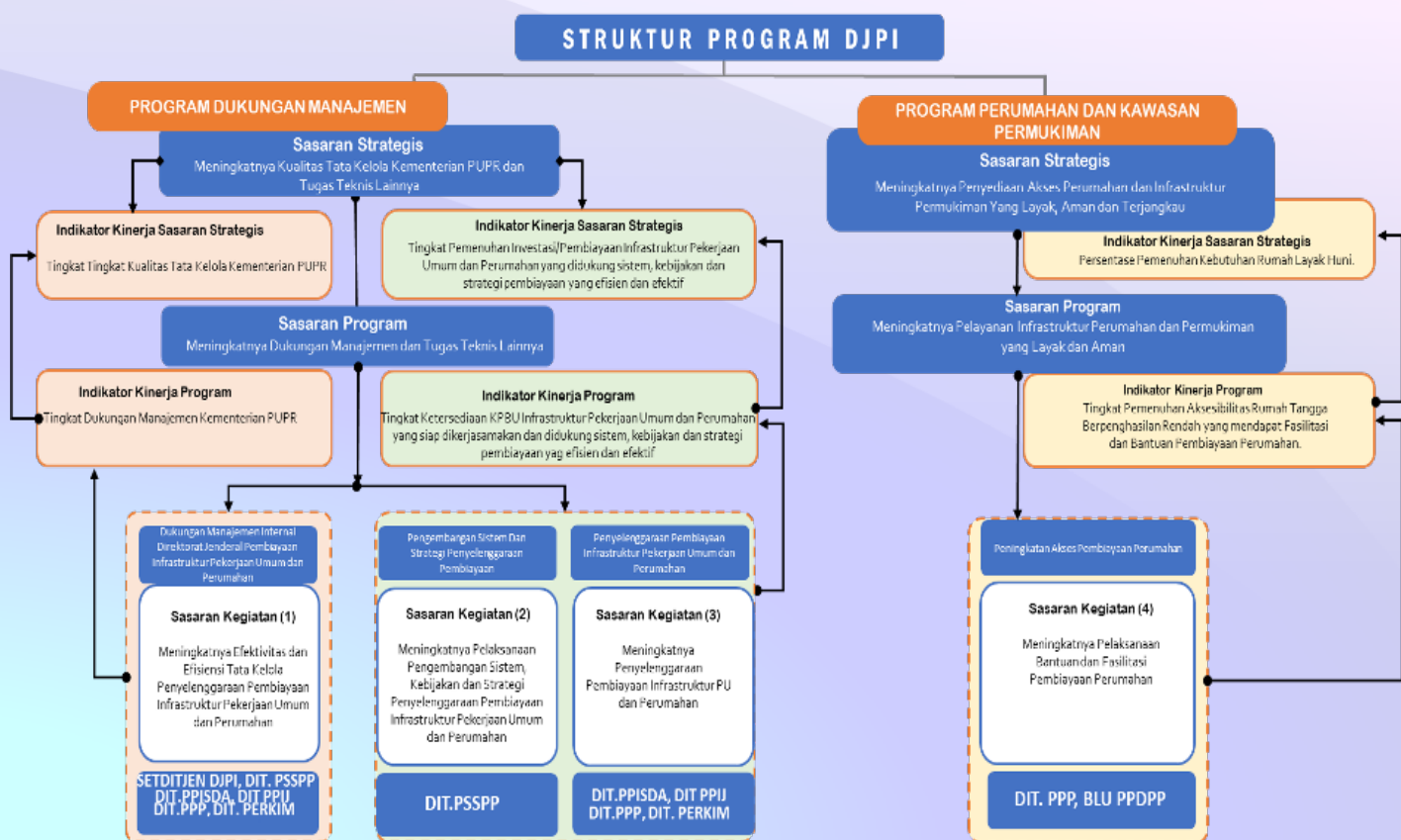
Indikator Kinerja Program terdiri dari dua indikator yaitu:

- a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR), diampu oleh Sekretariat DJPI dan Direktorat di lingkungan DJPI.
- b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan.

- 2) **Sasaran Program** Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman. **Indikator Kinerja Program** tersebut mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

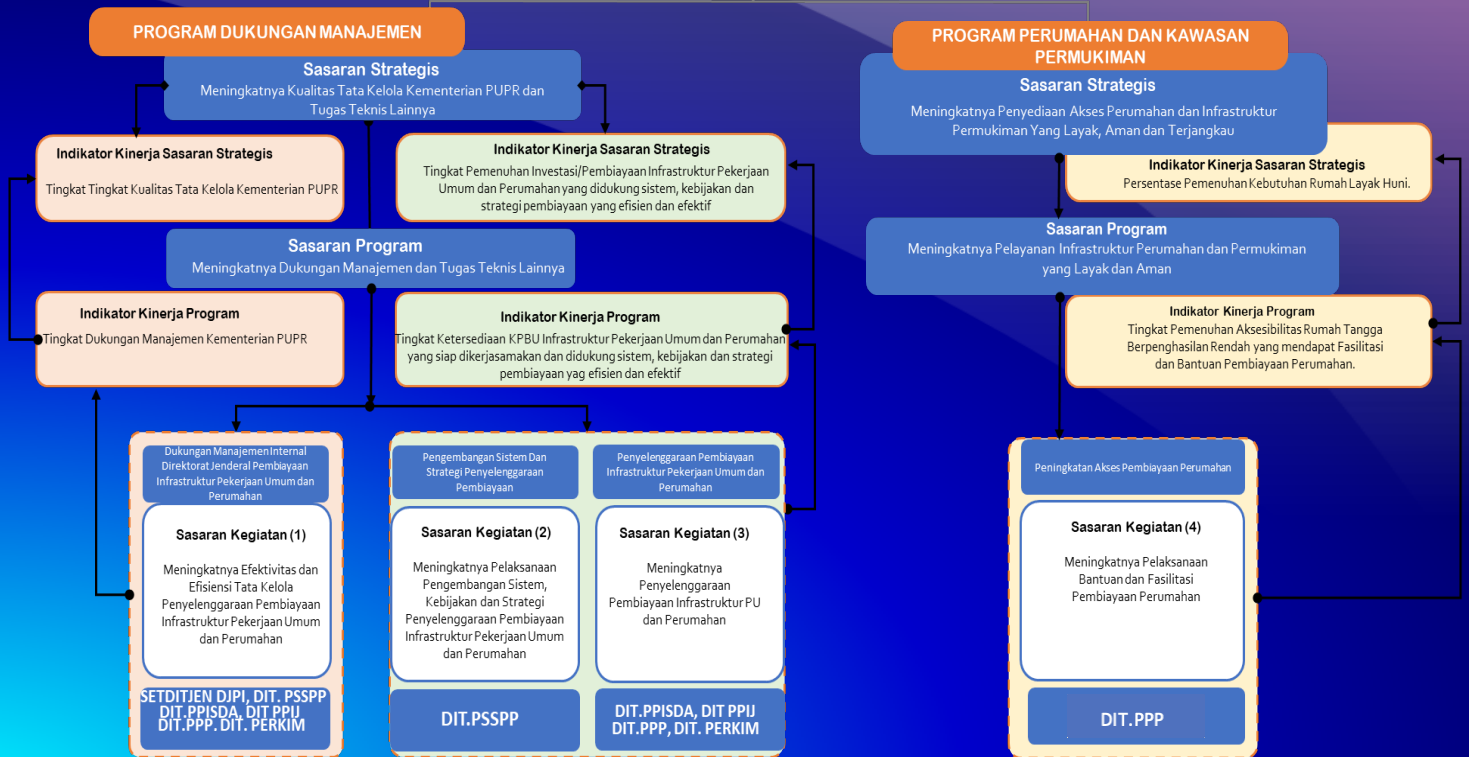
Untuk mendukung (1) Program Dukungan Manajemen serta (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap Unit Kerja di lingkungan DJPI berkontribusi terhadap capaian Sasaran Program melalui Sasaran Kegiatan (SK) Unit Kerja. Adapun Peta Strategis DJPI untuk (1) Program Dukungan Manajemen serta (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Cascading Program dan Kegiatan DJPI TA. 2020 – 2022



Gambar 2.2 Cascading Program dan Kegiatan DJPI TA. 2023 – 2024

STRUKTUR PROGRAM DJPI



Tabel 2.1 Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Cara Perhitungan Tahun 2020-2022

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	2. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK 01	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip (%) 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (15%): <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPP)	Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	2. Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan (%) 3. Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran (%) 4. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%) 5. Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (%) 6. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 7. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor (%)	yang disusun dibandingkan dengan target (10%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%) • Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) • Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) • Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) • Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			8. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	<p>dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%) Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%) 		
		2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum (%) Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama (%) 	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 2 (15%):</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%) 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			3. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (%)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 		
		3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (%) Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (%) 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 3 (10%): <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		dan Perumahan (10%)		dibandingkan dengan target (25%) 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)		
		4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (%) 2. Laporan Kinerja yang disusun (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 4 (10%) 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun (%) 2. Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun (%) 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 5 (15%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 		
		6. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat (%) 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 6 (10%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		2. Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi (%)	disusun dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		
	7. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (%) 2. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 7 (10%) 1. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		8. Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 2. Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (%) 3. Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (%) 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 8 (15%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%) 3. Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%) 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 	IKSS, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target. • Indikator 2 (70%) Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang 		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.		
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%) 	IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		
SK 02	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)</p> <p>3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) <p>Indikator 2 (30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) <p>Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB</p>		
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb:		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Infrastruktur Sumber Daya Air	1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	<ul style="list-style-type: none"> ● Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target ● Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target 		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sbb: <ul style="list-style-type: none"> ● Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan 		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)</p> <p>2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)</p>	<p>dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target</p> <p>• Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target</p>		
		3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman:</p> <p>1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)</p> <p>2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan</p>	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sbb:</p> <p>• Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target</p> <p>• Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Infrastruktur Permukiman (%)	dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
		4. Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Perumahan sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SS	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni (IKSS 02)	IKSS 02, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%)	<p>Indikator Kinerja SS</p> <p>Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50%</p> <p>IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi hasil perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left[\left(\frac{\sum(V + W)}{11.000.000} \right) * 100 \right] * \{X - Y\}$		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)		
SP 01	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	1. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan	IKSP1, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%)	IKSP1, dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan dibandingkan dengan target		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Bantuan Pembiayaan Perumahan				
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%) 2. Persentase Rumah Tangga yang 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target.		Internal dan eksternal (Bank, PT SMF dan BP Tapera)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%)</p> <p>3. Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)</p>	<p>Indikator 3 (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target.</p>		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <p>1. Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan promosi, kerjasama dan verifikasi (%)</p> <p>2. Persentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan,</p>	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (50%) Jumlah Fasilitasi Penyaluran FLPP yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan verifikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.</p> <p>Indikator 2 (25%) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target.</p>		Internal dan Eksternal (Bank)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			keuangan dan kinerja (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%)	Indikator 3 (25%) Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.		

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Cara Perhitungan Tahun 2023-2024

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPP)	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip (%) 2. Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan (%) 3. Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran (%) 4. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%) 5. Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: • a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan • Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = $\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}}$ • Persentase Pembinaan Kearsipan = $\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}}$ 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			6. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 7. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor (%) 8. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	b. Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN • Penggunaan • $\text{PSP} = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di PSP}}{\text{total jumlah aset yang harus di PSP}}$ • $\text{Alih Status} = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di alih status}}{\text{total jumlah aset yang harus di alih status}}$ • Pemindahtanganan • $\text{Hibah} = \frac{\text{Jumlah BMN yang di proses}}{\text{total jumlah usulan}}$		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan = Jumlah BMN yang disetujui atau ditolak untuk dijual / (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan atau mendapat persetujuan penjualan pengguna barang • Tukar menukar = Jumlah BMN yang dilakukan tukar menukar/ (dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke Menteri / Sekjen selaku pengguna barang • Penghapusan <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah BMN yang dilakukan penghapusan / (dibagi) total 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan/atau mendapat persetujuan penghapusan di pengguna barang</p> <p>c. Tingkat Efektivitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan BMN = Persentase tindak lanjut penyelesaian Data Anomali BMN • Pemanfaatan BMN = Jumlah izin prinsip Pemanfaatan BMN (KSP/ KPBU/ KSPI/ BSGBG/ Sewa / Pinjam Pakai) yang telah disetujui dibagi dengan 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>yang telah disampaikan ke pengelola barang dan / atau mendapat persetujuan dari pengguna barang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penertiban BMN = Persentase penanganan pengamanan dan penertiban BMN yang direncanakan 		
		2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (15%)	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum (%) 2. Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Tingkat Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum • Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			3. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (%)	<p>dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Efektifitas Advokasi Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100% • Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100 % • Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100 % 		
	3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (%) Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (%) 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (%) 2. Laporan Kinerja yang disusun (%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Tingkat Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian <ul style="list-style-type: none"> • Nilai IKPA berdasarkan aplikasi MONEV-PA UNOR 2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				3. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP <ul style="list-style-type: none"> Dihitung berdasarkan kriteria: a) Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unor yang tepat waktu (50%), b) Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP yang lengkap (50%) 		
		5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun (%) Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan 	1. Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <p>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Perbendaharaan yang disusun (%)	Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga		
		6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat (%) 2. Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi (%) 	1. Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <p>Nilai Kesuksesan Penyelenggaraan Publikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kehadiran peserta, stakeholder feedback dan/atau persepsi/sentimen positif <p>Tingkat Kepuasan Pemohon Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		7. Nilai SAKIP Unit Organisasi (10%)		<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi</p> <p>Dihitung dari perbandingan antara realisasi nilai SAKIP dengan target nilai SAKIP tahun berjalan.</p> <p>Bobot 10% = 100% dari target tahun berjalan</p> $\% \text{ Nilai SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$ $\text{Sehingga Bobot} = \frac{\text{Nilai SAKIP}}{10}$		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	IKSS, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target dikali 100%. Indikator 2 (70%) Perbandingan antara realisasi nilai investasi/pembiayaan kreatif infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dengan target dikali 100% Proyek yang siap dikerjasamakan merupakan proyek yang telah		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				menyelesaikan tahap penyiapan (FBC) dan siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi).		
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, 	IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <p>Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target dikali 100%.</p> <p>Indikator 2 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			yang siap dikerjasamakan (%)	<p>paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100%</p> <p>Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS)</p> <p>Indikator 3 (35%)</p> <p>Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				tahap Prakualifikasi) dengan target dikali 100%		
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan 	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)</p> <p>3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)</p>	<p>dibandingkan dengan target (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Indikator 2 (30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) <p>Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Bobot 30% = 100% dari target tahun berjalan</p> $\% \text{ Nilai SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$ $\text{Sehingga Bobot} = \frac{\text{Nilai SAKIP}}{30}$		
SK 02	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air:</p> <p>1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan</p>	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator 1 (50%) <p>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Infrastruktur Sumber Daya Air (%)</p> <p>2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)</p>	<p>Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator 2 (50%) <p>Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target</p>		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan:</p> <p>1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)</p>	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator 1 (50%) <p>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)	<ul style="list-style-type: none"> Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
		3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sbb: <ul style="list-style-type: none"> Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target <ul style="list-style-type: none"> Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Infrastruktur Permukiman (%)	dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
		4. Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Perumahan sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SS	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni (IKSS 02)	IKSS 02, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%)	<p>Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK): indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50%</p> <p>IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi hasil perbandingan penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left[\left(\frac{\sum(V + W)}{11.000.000} \right) * 100 \right] * \{X - Y\}$		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)		
SP 01	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan	IKSP1, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%) menyumbang bobot 25% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Perumahan dan Kawasan	Kontribusi Kinerja Unit Organisasi pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Program Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Indikator 8 (DJCK) : Indikator 2 (DJP) : Indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25%		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pembiayaan Perumahan	Permukiman bersama Ditjen Perumahan.	<p>Kontribusi DJPI pada IKSS Program PKP sesuai rumus dibawah ini adalah meliputi kinerja W pada periode satu tahun</p> $A=Y+[\{((\sum(V+W))/(11.000.000)) * 100\} * \{X-Y\}]$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Untuk menghitung Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) khususnya DJPI digunakan perbandingan antara jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI meliputi program FLPP, SSB (Akad Baru), BP2BT, SMF dan TAPERA dibandingkan dengan target tahun bersangkutan dikali 100%.</p> <p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $W = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: W = Capaian Kinerja (%)</p>		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>A = Jumlah Realisasi Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT, SMF dan TAPERA) (unit)</p> <p>B = Target Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT, SMF dan TAPERA) (unit)</p>		
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	<p>Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:</p> <p>1. Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber</p>	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (30%)</p> <p>Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target.</p>		Internal dan eksternal (Bank, PT SMF dan BP Tapera)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%) 2. Persentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Indikator 2 (50%) Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (FLPP, SSB, BP2BT) dibandingkan dengan target. FLPP masuk kedalam Indikator 2 setelah adanya proses likuidasi BLU PPDPP Indikator 3 (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target.		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (0%) Jumlah Fasilitasi Penyaluran FLPP yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan verifikasi		Internal dan Eksternal (Bank)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pembiayaan Perumahan	<p>promosi, kerjasama dan verifikasi (%)</p> <p>2. Persentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%)</p> <p>3. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%)</p>	<p>yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.</p> <p>Indikator 2 (0%) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target.</p> <p>Indikator 3 (0%) Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.</p>		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024

Prioritas Pembangunan Nasional

Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan **Prioritas Pembangunan** (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan:

PN_1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

PN_2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

PN_3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

PN_4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

PN_5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

PN_6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.

PN_7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan negara.

Arah Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024 mencakup arah kebijakan di sektor pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan serta sektor Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

- **Bidang Sumber Daya Air**

- i. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan terkait waduk multiguna adalah:

(1) Penyediaan infrastruktur tampungan air multiguna dan berkelanjutan. Strategi untuk kebijakan tersebut antara lain: (a) Penerapan standar internasional penilaian kelayakan pembangunan bendungan baru; (b) Penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pembangunan bendungan baru; (c) Pemanfaatan potensi waduk baru dengan pembangunan prasarana irigasi, air baku, dan PLTA melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (2) Pengembangan waduk multiguna secara terpadu dengan pengembangan kawasan KEK/KI. Strategi untuk kebijakan tersebut antara lain: (a) Penerapan skema investasi Large Scale Low Cost Hydropower for Industry; (b) Pemanfaatan potensi International Grid (HVDC) untuk peningkatan pasokan energi domestik dan komersial; (c) Optimalisasi link and match potensi waduk multiguna dengan kebutuhan pengembangan Kawasan KEK/KI; serta (d) Penerapan HSAP-IHA (Hydropower Sustainability Assessment Protocol) sebagai standar percepatan pemanfaatan infrastruktur SDA untuk PLTA dalam rangka

meningkatkan kelayakan pembangunan waduk multiguna dengan skema KPBU.

Arah kebijakan terkait modernisasi irigasi adalah: Pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta peternakan, tambak, dan pertanian non-padi. Strategi dari kebijakan tersebut antara lain: (a) Optimalisasi layanan jaringan irigasi untuk tanaman pangan; (b) Pengembangan layanan irigasi untuk peternakan, tambak, dan pertanian non-padi; (c) Penyusunan standar efisiensi dan kinerja penggunaan air untuk irigasi sesuai karakteristik petani; dan (d) Perbaikan sarana dan prasarana irigasi, yang diarahkan kepada isu adanya adaptasi infrastruktur dalam kerangka pemenuhan pelayanan, penyediaan dana, dan sumber daya manusia yang optimal sebagai salah satu pilar modernisasi irigasi khususnya melalui penyediaan pendanaan melalui skema KPBU.

ii. Pengelolaan Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam pengelolaan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku yang aman dari sumber air sampai konsumen sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan (water safety plan). Strategi untuk kebijakan ini antara lain: (a) Optimalisasi sumber air baku dari bendungan; (b) Rehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur penyedia air baku, Water Treatment Plant (WTP), serta sistem distribusi; dan (c) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi proyek KPBU Saluran Air Baku (SAB) dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka KPBU proyek gabungan (bundling project).

● Bidang Jalan dan Jembatan

i. Peningkatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas jalan dilaksanakan untuk mengurangi waktu tempuh. Waktu tempuh yang tinggi dapat berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan dapat menghambat daya saing Indonesia di dunia global.

Diharapkan pada tahun 2024 dapat diwujudkan dominasi jaringan jalan nasional yang memiliki waktu tempuh dibawah 2,0 jam/100 km (dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam).

ii. Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas akan didorong untuk mendukung simpul/kawasan wilayah strategis yang sudah terhubung jalan nasional, khususnya yang mendukung pengembangan wilayah melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Aceh-Provinsi Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh. Sementara itu, pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin pemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara, seperti diantaranya dengan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga dapat mendukung berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut.

iii. Peningkatan Kapasitas Jalan

Peningkatan kapasitas jalan didorong untuk menjadi solusi kemacetan telah menjadi persoalan utama pada jaringan jalan nasional yang menyebabkan rendahnya tingkat kinerja angkutan barang dan orang.

Peningkatan kapasitas jalan juga diprioritaskan untuk mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (road overloading) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan.

Mengingat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas jalan yang sangat besar, diperlukan inovasi skema pembiayaan infrastruktur selain APBN, salah satunya adalah

seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (revolving fund) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Skema pembiayaan KPBU saat ini terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah KPBU berbasis User Charge dimana pengembalian investasi berdasarkan tarif pengguna jalan, dan KPBU berbasis Availability Payment (AP) yang berbasis kinerja. Skema KPBU-AP diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan, salah satunya adalah dengan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (road overloading) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

- **Bidang Permukiman**

- i. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah : Meningkatkan tata kelola kelembagaan melalui (a) peningkatan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah; (b) peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi; (c) peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum antar program dan antar stakeholder (pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, unit pelaksana, dan masyarakat) melalui penguatan peran Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS)/ AMPL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten; (d) pembentukan badan regulator air minum; (e) penyusunan undang-undang air minum dan air limbah; serta (f) pengembangan sumber alternatif pendanaan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan skema investasi badan usaha melalui KPBU.

- i. Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses sanitasi layak dan aman, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) **Pengembangan layanan**

sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif (KPBU); (c) **Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain**; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut, dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan, melalui: (a) penguatan fungsi operator dan regulator; (b) penyiapan layanan lumpur tinja perkotaan (Fecal Sludge Management); (c) penyediaan layanan terintegrasi air minum, air limbah dan persampahan; (d) pengembangan kawasan dengan layanan air siap minum (portable water) / Zona Air Minum Prima (ZAMP); dan (e) peningkatan keandalan pengelolaan jaringan air minum melalui Smart Grid Water Management.
- 2) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota.

- **Bidang Perumahan**

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side), dan lingkungan yang mendukung (enabling environment). Strateginya adalah sebagai berikut:

1. Sisi Permintaan (Demand Side):

- Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
- Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
- Pengembangan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

2. Sisi Pasokan (Supply Side):

- Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
- Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
- Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
- Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
- Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

3. Sisi Enabling Environment:

- Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
- Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;

- Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
- Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
- Pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan Nasional dan daerah.

Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (new town).

Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2020 – 2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
2. Pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

3. Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
4. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Berikut daftar Major Project yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian PUPR dalam Major Project RPJMN 2020-2024

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
MENDORONG PERTUMBUHAN				
1	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024) 	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) 	25 • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 		Usaha (BUMN/ Swasta)
3	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024 	30 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 7,2 KPBU dan Swasta: 22,8 	a.l Kemen KP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
4	Pembangunan Wilayah Batam–Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam- Bintan 	69,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 6,4 KPBU: 9,5 Badan Usaha 54,0 	a.l BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam wilayah metropolitan 	229,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.i KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
6	Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah 	466,04 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 90,35 KPBU: 252,46 Badan Usaha: 123,33 	a.l KemenPPN/ Bappenas, KemenATR/BP N, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) 	134,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/Swasta)

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
8	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan 	27,5 (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemendes, Kementan, Kementerian Desa PDTT, Kemenhub, Pemda
9	Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana 	15,2 • APBN: 14,8 • APBD: 0,4	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga 	3,4 • APBN: 3,0 • KPBU: 0,4	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Kemen KP

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya ▪ Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 		
11	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup ▪ Menurunnya prevalensi stunting hingga 14% 	87,1 (APBN)	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
12	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 	308,5 <ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN: 105,5 ▪ KPBU: 203,0 	a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
13	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta –Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam. ▪ Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 	63,6 <ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN: Rp 58 ▪ Badan Usaha: Rp42 	a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan 	118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha).	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
15	Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	<ul style="list-style-type: none"> Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024 Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional 	1.121,0 <ul style="list-style-type: none"> (Badan Usaha) 	a.l KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
16	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	<ul style="list-style-type: none"> Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon Menurunkan waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit) 	54,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 31,4 KPBU: 18,7 APBD: 4,8 	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
17	18 Waduk Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh 	92,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 12,9 KPBU: 24,0 Swasta: 60,0 	a.l KemenPUPR, Swasta

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
		pemanfaatan teknologi di 9 DI		
18	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 	12,4 (APBN)	a.L KemenPUPR, Pemda
19	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah pedalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 	15,4 (APBN)	a.L KemenPUPR,
20	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 	140 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 73,5 APBD: 1,7 Masyarakat:/S wasta 65,7 	a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta) , dan Masyarakat
21	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 	123,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 77,9 APBD: 15,6 KPBU: 29,9 	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
22	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh 	397,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 18,0 APBD: 109,2 BUMN: 28,0 Swasta: 237,5 Masyarakat: 5,0 	a.l Kemen PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
23	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha ▪ Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara 	30,9 (APBN)	a.l. KemenPUPR, KemenLHK,

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR

Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan “infrastructure for all” yang memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan Focal Point) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data

terpilah; alat analisa gender (Gender Analysis Pathway/GAP) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK); (2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpisah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender; (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan Focal Point, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah; (5) Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain; (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan; (7) Peningkatan kerja sama dengan multi pihak (K/L, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif

gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

B. Arah Kebijakan PUPR Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Arah kebijakan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi: (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (2) Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); (3) Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (4) Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024; (5) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU melalui three bold actions; (6) Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel; (7) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya; (8) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan; (9) Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (refinancing); (10) Percepatan operasionalisasi BP Tapera; (11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Arah kebijakan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024;
5. Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU melalui three bold actions;
6. Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
7. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (refinancing);
10. Percepatan operasionalisasi BP Tapera;

11. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan,.

Adapun strategi yang akan ditempuh meliputi:

1. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024;
4. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui bundling infrastruktur;
6. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai bridging finance KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI;
7. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek unsolicited;
8. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek unsolicited dari badan usaha pemrakarsa;
9. Percepatan tahap penyiapan dan transaksi proyek KPBU melalui three bold actions;
10. Refocusing kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang PU dan Perumahan;
11. Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan scale up pembiayaan infrastruktur;
12. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;

13. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi demand dan supply;
14. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;
15. Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan;
16. Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA;
17. Mendorong peran serta Pemda dalam Pembiayaan Perumahan melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi;
18. Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung major project perumahan publik.

Adapun sasaran strategis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan Norma, Standar, Peraturan Dan Kriteria (NSPK) di bidang pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Terlaksananya fasilitasi perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Terwujudnya peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai simpul KPBU Kementerian PUPR;
5. Tersusunnya skema kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik dalam rangka kepemilikan rumah umum maupun pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya yang lebih efektif dan efisien;
6. Terlaksananya fasilitasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PT. SMF, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;

7. Terlaksananya bantuan/subsidi di pembiayaan perumahan sebanyak 968.654 Unit
8. Terlaksananya fasilitasi pembiayaan dari Lembaga Keuangan (PT. SMF dan TAPERA) sebanyak 550.000 Unit.

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 2 program dan 4 kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 3.1 Redesain Program Kementerian PUPR

	PROGRAM EKSTISTING	REDESAIN PROGRAM
SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Peningkatan Sarpas ASN KemenPUPR 	Program Dukungan Manajemen
ITJEN	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	Program Dukungan Manajemen
BPSDM	Program Pengembangan SDM Bidang PUPR	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
BPIW	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Program Dukungan Manajemen
DJBK	Program Pembinaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
DJPI	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJCK	Program Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJP	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJSDA	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo 	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Kelahiran Sumber Daya Air
DJBM	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Infrastruktur Konektivitas

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.
- Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: (1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum; (2) Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana; (3) Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Serta Bantuan Hukum; (4) Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah; (5) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik; (6) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR; (7) Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; (8) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal; (9) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air; (10) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga; (11) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; (12) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan; (13) Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Tugas Teknis Lainnya; (14) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (15) Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (17) Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi; (18) Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi; (19) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi; (20) Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; (21) Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia; (22) Penyelenggaraan Pengembangan Talenta; (23) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Bidang PUPR; (24) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan; (25) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR; **(26) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (27) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; (28) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.**

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi DJPI untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta

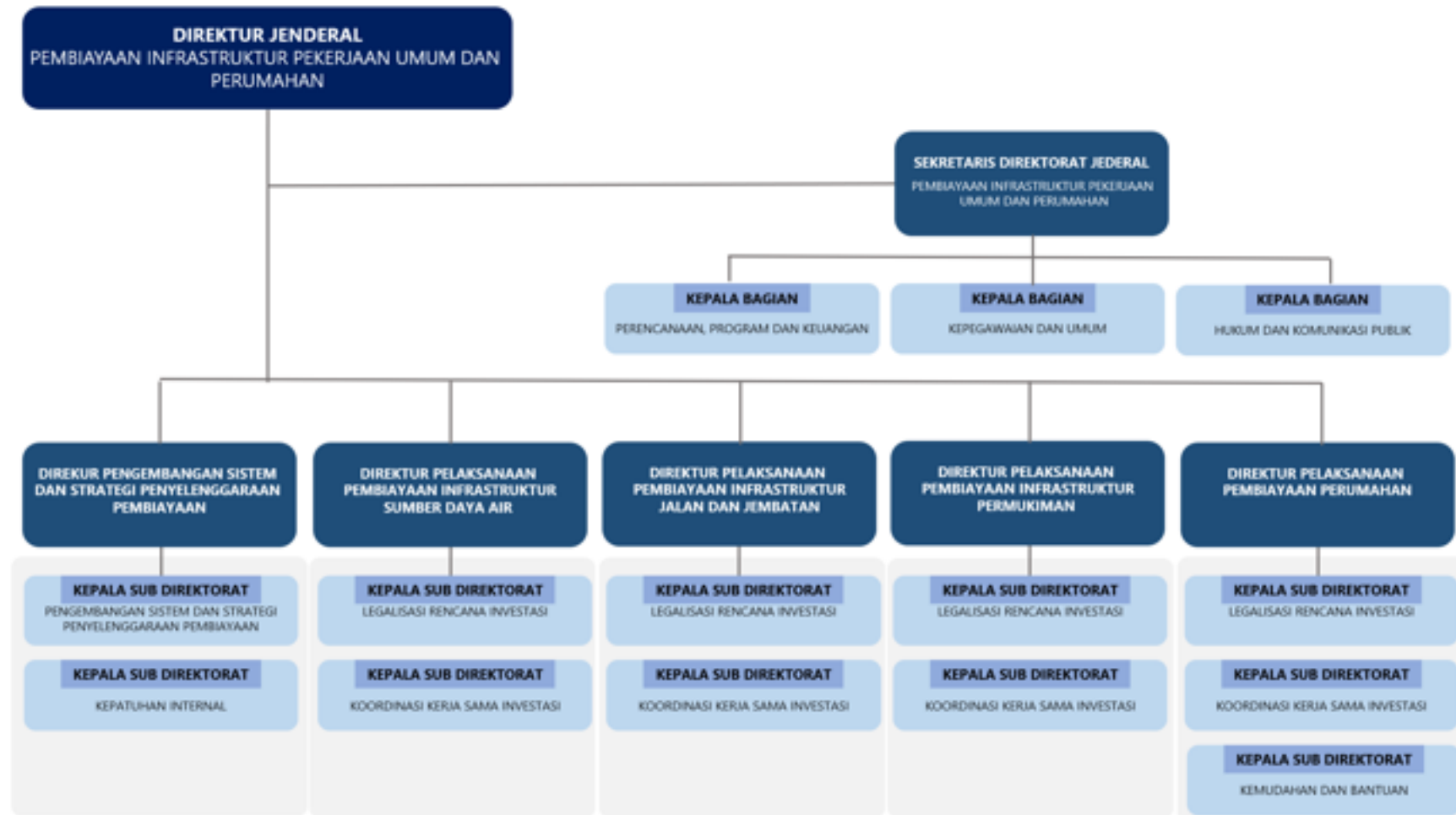
kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Regulasi-regulasi yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam selama periode Renstra 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berikut disampaikan kerangka kelembagaan di DJPI sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Unit Kerja Eselon 2 Mandiri pada BLU PPDPP sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan



Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan unit organisasi yang akan mengemban sebagian Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan melaksanakan program pengembangan pendanaan dan sistem pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024.

Tugas

Tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi yang harus diselenggarakan adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Penetapan sumber pendanaan, dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibantu oleh:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal

Fungsi	:	-	Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
		-	Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
		-	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
		-	Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
		-	Pelaksanaan penatausahaan BMN;
		-	Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi
		-	Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional
		-	Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal

		-	Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum
		-	Pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
		-	Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri dari:

- Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

- Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal
- Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, terdiri dari:

- Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur;
- Sub Direktorat Kepatuhan Intern; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerjasama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

- Fungsi : - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman

- Fungsi : - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerjasama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari:

- Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi;
- Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan; dan
- Subbagian Tata Usaha.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam upaya pembangunan suatu organisasi yang berkesinambungan, Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan. Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 242 orang yang terdiri dari PNS dan P3K. Dalam mendukung tercapainya kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan juga dibantu oleh pegawai non-ASN sebanyak 181 orang yang terdiri dari Honorer dan Konsultan Individu (KI) , sehingga

total SDM pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan pada tahun 2023 sebanyak 423 orang.

Tabel 3.2 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2023

No	Unit Kerja	ASN		Non ASN		Jumlah
		PNS	P3K	Honor er	TPI	
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	0	0	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	54	2	51	18	125
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	28	5	7	17	57
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	24	6	8	8	46
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	32	9	6	10	57
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	26	5	8	14	53
7	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	40	10	8	26	84
Total		205	37	88	93	423

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian Nomor KP 06.01-Ps.2/85

Tabel 3.3 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN		Non ASN		Jumlah
		PNS	P3K	Honor er	TPI	
1	Laki-Laki	113	25	69	54	261
2	Perempuan	92	12	19	39	162
TOTAL		205	37	88	93	423

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian Nomor KP 06.01-Ps.2/85

Tabel 3.4 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2023
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		PNS	P3K	Honor er	TPI	
1	S3	1	0	0	0	1
2	S2	111	0	4	9	124
3	S1	82	36	29	80	227
4	DIPLOMA	5	1	6	2	14
5	SMA	6	0	38	0	44
6	SMP	0	0	10	2	12
7	SD	0	0	1	0	1
Total		205	37	88	93	423

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian Nomor KP 06.01-Ps.2/85

Tabel 3.5 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2023 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Jumlah
1	Analisis Anggaran		5					5
2	Analisis Hukum			3				3
3	Analisis Kebijakan	7	18	79				104
4	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	13	2				17
5	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn		4					4
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	4					5
7	Arsiparis		4	3				7
8	Pembina Jasa Konstruksi		1	1				2
9	Penata Kelola Perumahan	1						1
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		1	1				2
11	Perancang Peraturan Perundang-Undangan		1					1
12	Perencana		1	9				10
13	Pranata Humas		4	1			1	6
14	Pranata Komputer		1	4				5
15	Pranata Pengelolaan Keuangan Apbn						1	1
16	Teknik Jalan Dan Jembatan		2	2				4
17	Teknik Pengairan			3				3
18	Teknik Penyehatan Lingkungan		1	2				3
19	Teknik Tata Bangunan & Perumahan	1	2	2				5
	Jumlah	12	62	112	0	0	2	188

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian Nomor KP 06.01-Ps.2/85

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melakukan upaya-upaya antara lain melalui:

1. Pelaksanaan capacity building Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Pelatihan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
6. Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan dan Keprotokolan
7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengikut sertakan dalam pertemuan atau seminar/workshop/short course (pendidikan/pelatihan singkat).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024. Target kinerja terdiri dari target sasaran program (outcome) dan target sasaran kegiatan (output). Target sasaran program (outcome) dan output sebagaimana terlampir.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja DJPI Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
SS3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat								
	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	(1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living (%)	60,29	70.08	80.07	89.93	98.57	98.57	DJCK
		(2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	59,79	DJP dan DJPI
SS5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.								
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (%)	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81	Semua Unor

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
	PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	100	100	100	100	100	DJPI

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN maupun Non APBN.

Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis DJPI sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 4.706.394.000.000, matrik kerangka pendanaannya dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Lampiran 2

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan DJPI 2020 – 2024
Per Unit Kerja (Rp. Juta)

NO	UNIT KERJA	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL (Juta Rp)
1	Setditjen DJPI	118.182	112.207	91.258	75.938	80.266	477.850
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	40.240	51.221	23.602	22.500	22.500	160.063
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	11.042	22.000	47.290	43.125	44.050	167.507
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	17.779	113.150	31.921	32.870	33.847	229.567
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	12.273	20.600	33.500	33.500	30.500	130.373

NO	UNIT KERJA	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL (Juta Rp)
6	Direktorat Pelaksanaan* Pembiayaan Perumahan	1.344.72 2	1.682.40 2	129.28 2	97.503	103.303	3.356.852
7	BLU PPDPP	71.953	72.953	48.074			220.048
TOTAL							3.576.900

Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan DJPI 2020 – 2024
Per Program (Rp. Juta)

PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman*	1.335.572	1.668.152	69.123	26.480	28.328	3.127.655
Program Dukungan Manajemen	90.484	221.221	196.472	202.658	205.872	916.707
Total						4.493.537

Berdasarkan Visium PUPR 2030, total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur PUPR pada RPJMN IV setidaknya mencapai 2.058 Triliun Rupiah dengan rincian kebutuhan anggaran per sektor, yaitu: (1) Sektor Sumber Daya Air sebesar 577 Triliun Rupiah; (2) Sektor Jalan dan Jembatan sebesar 573 Triliun Rupiah; (3) Sektor Permukiman sebesar 128 Triliun Rupiah; dan (4) Sektor Perumahan sebesar 780 Triliun Rupiah. Total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur ini tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan anggaran Pemerintah karena APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi sekitar 30% (623 Triliun Rupiah) dari total kebutuhan anggaran. Sedangkan sesuai dokumen Renstra Kementerian PUPR, diketahui bahwa pada tahun 2020-2024, alokasi pendanaan APBN hanya mampu mendanai sekitar 43% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp. 889 Triliun.

Sebagai salah satu inovasi alternatif pembiayaan infrastruktur untuk menutupi gap pendanaan sebesar 70% (1.435 Triliun Rupiah) tersebut adalah dengan mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan

infrastruktur melalui skema KPBU. Melalui skema ini, Badan Usaha terikat hubungan kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana penyelenggaraannya menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara kedua belah pihak. Total indikasi proyek KPBU sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024 adalah sebanyak 87 proyek KPBU dengan indikasi nilai investasi sebesar Rp. 874 Triliun (1) Sektor Sumber Daya Air sebanyak 9 proyek dengan indikasi nilai investasi sebesar Rp. 14 Triliun; (2) Sektor Jalan dan Jembatan sebesar 51 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 687 Triliun; (3) Sektor Permukiman sebanyak 18 proyek dengan indikasi nilai investasi sebesar Rp. 29 Triliun; dan (4) Sektor Perumahan sebanyak 9 proyek dengan indikasi nilai investasi sebesar Rp. 142 Triliun. matrik Indikasi Proyek KPBU 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

BAB V

PENUTUP

4.1 Penutup

Rencana Strategis DJPI tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini selanjutnya digunakan oleh Unit Kerja di lingkungan DJPI untuk menyusun Renstra Unit Eselon II dan Renstra entitas di bawahnya. Selanjutnya, kebijakan serta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra akan dievaluasi pada pertengahan (Tahun 2022) dan akhir periode 5 tahun (Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kerangka Regulasi

Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan DJPI

Lampiran 3: Indikasi Proyek KPBU 2020-2024

Lampiran 1 Arah Kerangka Dan/Atau Kebutuhan Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol	Peraturan Menteri terkait Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unor di Kementerian PUPR(DJBM, DJPI, BPJT)	2020
2	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPBU	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
3	Revisi atas Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPBU	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
4	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan	Perubahan skema dan mekanisme pembiayaan perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	2020-2024
5	Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang SDA	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6	Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
7	Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Kemenkeu, Ditjen SDA, PT PII, dan BUP	2020
8	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA	Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI	2021
9	Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI, PT PII	2021
10	Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
11	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
12	Pedoman Pemantauan	Tata Cara Pemantauan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Investasi Infrastruktur SDA	Investasi Infrastruktur	Infrastruktur SDA	Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	
13	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Melalui Optimasi Bendungan	Penugasan Khusus BUMN Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Optimasi Pemanfaatan Asset Pada Bendungan Dan Pencapaian Target Bauran Energi Premier Yang Optimal Pada Tahun 2025	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Kemen PUPR, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemen ESDM, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenkumham, PT.PLN, BUMN Karya	2024
14	Revisi Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	Perbaikan proses bisnis pelaksanaan KPBU pada Tahap Perencanaan, Penyiapan, Transaksi, dan Pelaksanaan Perjanjian KPBU sebagai upaya percepatan pelaksanaan dan/atau delivery project dengan skema KPBU bidang PUPR	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2024
15	Service Level Agreement (SLA) Bendungan	Pedoman Pembayaran KPBU Availability Payment untuk sub sektor bendungan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PUPR, DJPI	2021
16	Service Level Agreement (SLA) Daerah Irigasi	Pedoman Pembayaran KPBU Availability Payment	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan	Ditjen. SDA, DJPI	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		sub sektor daerah irigasi	Infrastruktur SDA		
17	Rancangan Perpres Honorarium, Insentif dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tapera	Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pembiayaan Perumahan Luncuran Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	BP Tapera dan Kementerian yang termasuk ke dalam Komite Tapera	2022
18	Rancangan Keputusan Presiden Tentang Keanggotaan Komite Tapera Yang Mewakili Unsur OJK	Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pembiayaan Perumahan Menindaklanjuti Surat Usulan OJK Nomor: S-42/MS.1/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 tentang Anggota Komite Tapera dari Unsur Komisioner OJK	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	BP Tapera dan Kementerian yang termasuk ke dalam Komite Tapera	2022
19	Pedoman Pembiayaan Rumah Sederhana Hijau	Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bappenas, GBCI, Sekretariat BGH, OJK	2023
20	Penyempurnaan NSPK KPBU Sektor Perumahan Solicited (Perencanaan, Penyiapan, Transaksi)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
21	Penyempurnaan NSPK KPBU Sektor Perumahan Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan, Badan Otorita, Satgas PPI IKN	2022-2024
22	Pedoman Pelaksanaan Survey Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey) Perumahan	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	2023
23	Pedoman Perjanjian Kerjasama (PKS) KPBU SPAM	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2022
24	Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Persampahan dan Air Limbah	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2020
25	Prosedur Standar Fasilitas Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah dan Prosedur Standar Pelaksanaan KPBU Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2021
26	NSPK Alur Kerja dan Dokumen Pendukung yang diperlukan dalam Peralihan Proses KPBU dari Tahap Penyiapan ke Tahap Transaksi dan Pelaksanaan	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman				
27	Pedoman Standar Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2024
28	SOP Monitoring Proyek KPBU Permukiman (SPAM Karian Serpong dan Djuanda)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2024
29	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Pembubaran Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Menindaklanjuti: 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B/112/M.KT.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Persetujuan Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. 222. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR nomor 208/KPTS/SJ/2022 tentang Pembentukan Tim	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kementerian PANRB, Setjen PUPR, Kementerian Keuangan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Penyusun Rapermen PUPR tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). 3. Surat Menteri Keuangan nomor S-15/PB/PB.5/2022 tanggal 8 April 2022 hal Tindak Lanjut atas Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pusat Pembiayaan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).			
30	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Pembubaran Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	3. Surat Menteri Keuangan nomor S-15/PB/PB.5/2022 tanggal 8 April 2022 hal Tindak Lanjut atas Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pusat Pembiayaan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kementerian PANRB, Setjen PUPR, Kementerian Keuangan	2022
31	Revisi Kedua Permen PUPR Nomor 01 Tahun	Penyesuaian masa konsesi jalan tol dan Penyesuaian atas	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan		
32	Revisi PP 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	BP Tapera dan Kementerian yang termasuk ke dalam Komite Tapera	2023
33	Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha	Kebutuhan pengaturan yang memuat secara rinci mekanisme pengusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unit Organisasi Kementerian PUPR (DJBM, DJPI, BPJT)	2021
34	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 03/SE/Dp/2021 tentang Pedoman Dokumen Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha (<i>Unsolicited</i>) di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Peningkatan kepastian proses dan waktu dalam pemberian persetujuan pengusahaan jalan tol <i>unsolicited</i>	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. PPIJ, Dit. PSSPP)	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
35	Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	Tujuan: Perubahan kedua atas Perpres No. 100 Tahun 2014 dilakukan dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dimana JTTS ditargetkan dapat tersambung dari Lampung sampai dengan Aceh yang bertujuan untuk memangkas waktu tempuh dari sebelumnya 48 jam menjadi 30 jam	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kementerian/L embaga terkait (Kemensetneg, Kemenkumham, Kemenko Bid. Perekonomian, Kemenko Bid. Kemaritiman dan Investasi, Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, KemenBUMN, KemenPUPR, PT Hutama Karya)	2022
36	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	Tujuan: Perubahan ketiga atas Perpres No. 100 Tahun 2014 dilakukan dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Memperhatikan konektivitas pada jalan tol yang telah beroperasi serta target penyelesaian, serta terdapat <i>missing link</i> pada ruas <i>backbone</i> sehingga konektivitas	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kementerian/L embaga terkait (Kemensetneg, Kemenkumham, Kemenko Bid. Perekonomian, Kemenko Bid. Kemaritiman dan Investasi, Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, KemenBUMN, KemenPUPR, PT Hutama Karya)	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<i>backbone</i> JTTS belum optimal.			
37	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 02/SE/Dp/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol	Meningkatkan akuntabilitas dokumen lelang pengusahaan jalan tol dengan melakukan penyusunan pedoman penyusunan Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol di lingkungan Kementerian PUPR	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unit Organisasi Kementerian PUPR (DJBM, DJPI, BPJT)	2024
38	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 04/SE/Dp/2024 tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi Dokumen Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol	Meningkatkan akuntabilitas dokumen lelang pengusahaan jalan tol dengan melakukan penyusunan pedoman mekanisme penilaian atas substansi dokumen studi kelayakan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unit Organisasi Kementerian PUPR (DJBM, DJPI, BPJT)	2024
39	Rancangan Keputusan Menteri PUPR tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pengusahaan jalan tol perlu disusun dan ditetapkan Standar Operasional Perencanaan dan Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Unit Organisasi Kementerian PUPR (DJBM, DJPI, BPJT)	2024

Lampiran 2 Matriks Program, Kegiatan, dan Pendanaan

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	2,001,581	383,920	305.076	314.466	4,549.280
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
1	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100	100	90.484	221.221	196.472	202.658	205.872	916.707
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :														
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100	100	90.484	221.221	196.472	202.658	205.872	916.707
KEGIATAN 1: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	3	2	0	0	0	3	16,316	10,877	-	-	27,193
1	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	4,500	2,625	-	-	-	7,125
2	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	5,004	2,700	-	-	-	7,704
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	6,812	5,553	-	-	-	12,365
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	6	5	6	10	10	37	4,317	21,734	6,000	6,000	44,051
1	Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	4	4	16	3,203	1,600	2,500	2,500	2,500	12,303
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	3	3	12	1,114	19,357	1,500	1,500	1,500	24,971
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	3	3	7	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000
4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	0	0	2	-	777	1,000	1,000	1,000	3,777
3	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	5	6	6	2	2	21	3,871	5,000	6,000	6,000	26,871
1	Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	2	2	16	2,531	3,400	4,000	4,000	4,000	17,931
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	0	0	2	-	750	1,000	1,000	1,000	3,750
3	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	0	3	1,340	850	1,000	1,000	1,000	5,190

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		NSPK	2	0	1	0	0	3	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
	1	Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	0	0	3	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
5	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan		Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
	1	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	0	3	3	3	3	12	-	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	2	Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	3	Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Layanan	4	4	4	4	4	20	3,127	2,000	3,000	3,000	3,000	14,127
	1	Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	2	2	2	2	9	949	1,000	1,000	1,000	1,000	4,949
	2	Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	2	1	1	1	1	6	1,622	500	1,000	1,000	1,000	5,122
	3	Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	5	556	500	1,000	1,000	1,000	4,056
8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	7	3	3	3	3	19	3,890	2,000	2,500	2,500	2,500	13,390
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3	1	1	1	1	7	1,866	900	1,000	1,000	1,000	5,766
	2	Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	1,274	700	1,000	1,000	1,000	4,974

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	2,650
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	50,244	170,000	172,870	180,158	183,372	756,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :															
1		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25	25	25	25	25	25	11,042	22,000	47,290	43,125	44,050	167,507
2		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25	25	25	25	25	25	17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
3		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	%	25	25	25	25	25	25	12,273	20,600	33,500	33,500	30,500	130,373
4		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	%	25	25	25	25	25	25	9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
KOORDINATOR: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan															
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan										17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
OUTPUT KEGIATAN :															
1		Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	0	0	8	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	0	0	8	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
3		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	2	1	14	4,500	92,250	9,471	9,800	9,647	125,668

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	0	0	4	2,250	46,125	3,050	3,100	3,120	57,645
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	1	10	2,250	46,125	6,421	6,700	6,527	68,023
4		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	1	2	9	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	1	2	9	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
5		Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	4	13	10	2	2	31	3,800	6,600	7,700	7,900	8,600	34,600
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyediaan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	1	2	9	1,800	3,000	4,100	4,200	4,300	17,400
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	2	2	31	2,000	3,600	3,600	3,700	4,300	17,200
6		NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
7		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	5	6	23	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	5	6	23	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
8		Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	0	0	3	300	300	300	300	300	1,500
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	0	0	3	300	300	300	300	300	1,500
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air										11,042	22,000	47,290	43,125	44,050	167,507
	OUTPUT KEGIATAN :														
1		Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	4	2	3	2	2	13	1,894	1,200	3,100	4,725	5,150	16,069
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	1,368	600	600	700	800	4,068

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	1	1	7	525	600	2,500	4,025	4,350	12,000
2		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	1	1	6	946	2.100	600	2,400	2,400	8,446
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	1	1	6	946	2.100	600	2,400	2,400	8,446
3		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	3	5	4	2	2	16	3,603	11.550	31,900	23,600	23,600	94,253
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	1	1	7	2,803	1.500	14,400	20,000	14,000	52,703
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	4	2	1	1	9	800	10.050	17,500	3,600	9,600	41,550
4		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
5		Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	1	2	2	4	4	13	1,469	4,000	5,090	5,500	5,800	21,859
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	2	1	2	2	1	8	980	1,000	2,440	2,600	2,750	9,770
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Kesepakatan	1	2	2	4	4	13	489	3,000	2,650	2,900	3,050	12,089
6		NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	0	0	8	1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	0	0	8	1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
7		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17	960	950	3,500	3,800	3,800	13,010
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17	960	950	3,500	3,800	3,800	13,010
8		Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	0	0	3	176	300	300	300	300	1,376
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	0	0	3	176	300	300	300	300	1,376

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									12,273	20,600	33,500	33,500	30,500	130,373
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	3	3	13	1,807	1,800	1,800	1,800	1,800	9,007
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	2	2	8	1,207	800	800	800	800	4,407
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	600	1,000	1,000	1,000	1,000	4,600
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0	4	762	2,000	1,000	1,000	1,000	5,762
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0	4	762	2,000	1,000	1,000	1,000	5,762
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	0	2	8	1,673	5,500	19,000	19,000	16,000	61,173
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	1	4	700	4,000	10,000	10,000	10,000	34,700
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	1	4	973	1,500	9,000	9,000	6,000	26,473
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	5	1	9	900	1,500	1,000	1,000	1,000	5,400
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	5	1	9	900	1,500	1,000	1,000	1,000	5,400
5	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	3	4	4	2	2	15	3,781	6,800	5,100	5,100	5,100	25,881
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	1	1	11	1,454	2,800	2,500	2,500	2,500	11,754
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	3	4	4	2	2	15	2,326	4,000	2,600	2,600	2,600	14,126
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	2	1	5	0	500	500	500	500	2,000
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	2	1	5	0	500	500	500	500	2,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	4	3	3	4	4	18	3,113	2,200	4,800	4,800	4,800	19,713
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	4	4	18	3,113	2,200	4,800	4,800	4,800	19,713
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	1	1	1	0	0	3	237	300	300	300	300	1,437
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	0	0	3	237	300	300	300	300	1,437
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan										9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
	OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	0	5	600	500	750	1,000	1,000	3,850
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0	4	300	500	750	1,000	1,000	3,550
	2	Jumlah Penyusunan identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	300
2	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	0	3	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	0	3	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
3	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	1	1	9	1,750	5,750	30,000	35,000	36,500	109,000
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	1	0	0	5	875	5,750	15,000	17,500	18,250	57,575
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	1	4	875	0	15,000	17,500	18,250	51,625
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
	1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
5	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan		Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	4,000	4,096	21,000	25,000	26,307	80,403

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	3	2	2	2	2	11	3,500	2,096	17,000	20,000	20,307	62,903
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	500	2,000	4,000	5,000	6,000	17,500
6		NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500
	1	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500
7		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	4	4	11	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	4	4	11	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
8		Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	0	0	3	150	300	300	300	168	1,218
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	1	1	1	0	0	3	150	300	300	300	168	1,218
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
1		INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
1		INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55.92	63.35	71.54	90,44	94,58	94,58						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	118,182	112,207	91,258	75,938	80,266	477,850
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :															
1		Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	%	15	15	15	15	15	15						
2		Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	15	15	15	15	15	15						

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3		Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	%	10	10	10	15	15	15						
4		Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	10	10	10	15	15	15						
5		Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	15	15	15	15	15	15						
6		Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	%	10	10	10	15	15	15						
7		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP	%	10	10	10	0	0	0						
8		Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP	%	15	15	15	0	0	0						
9		Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	0	0	0	10	10	10						
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan															502,850
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan										74,068	67,094	71,859	75,938	80,266	369,224
		OUTPUT KEGIATAN :													
1		Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1,718
	1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1,718
2		Manajemen Transformasi Organisasi	Layanan	2	2	2	1	1	10	1,372	1,200	1,273	1,351	1,433	6,629
	1	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	2	2	1	1	10	1,372	1,200	1,273	1,351	1,433	6,629
3		Pengelolaan Pegawai	Orang	260	260	260	260	260	260	1,671	1,500	1,592	1,689	1,792	8,243
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	3	3	2	2	13	1,671	1,500	1,592	1,689	1,792	8,243
4		Tata Kelola TNDE dan Arsip	Layanan	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2,689

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2,689
5	Kerumahtanggaan		Layanan	3	2	2	2	2	11	2,810	1,000	1,061	1,126	1,194	7,191
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	3	2	2	2	2	11	2,810	1,000	1,061	1,126	1,194	7,191
6	Advokasi Hukum		Layanan	2	2	2	1	1	8	1,109	800	849	901	956	4,614
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	2	2	1	1	8	1,109	800	849	901	956	4,614
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait		Layanan	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2,214
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2,214
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		Layanan	3	3	3	2	2	13	1,724	1,500	1,592	1,689	1,792	8,296
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	3	2	2	3	13	1,724	1,500	1,592	1,689	1,792	8,296
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1	5	774	890	944	1,002	1,063	4,672
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	1	1	1	1	5	774	890	944	1,002	1,063	4,672
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		Layanan	4	2	2	2	3	13	2,395	1,300	1,448	1,536	1,630	8,308
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	4	2	2	2	3	13	2,395	1,300	1,448	1,536	1,630	8,308
11	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2,671
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2,671
12	Strategi Komunikasi		Layanan	2	2	2	1	1	8	1,516	1,100	1,379	1,463	1,553	7,011
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	2	2	1	1	8	1,516	1,100	1,379	1,463	1,553	7,011
13	Publikasi		Layanan	3	2	2	2	4	13	1,406	800	1,061	1,126	1,194	5,587

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	3	2	2	2	4	13	1,406	800	1,061	1,126	1,194	5,587
14		Laporan Keuangan Unit Eselon I	Laporan	1	1	1	2	3	8	1,651	500	955	1,013	1,075	5,194
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	2	3	8	1,651	500	955	1,013	1,075	5,194
15		Laporan Kinerja Unit Eselon II	Laporan	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1,472
	1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1,472
16		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	Laporan	2	1	1	2	2	8	1,074	1,000	1,061	1,126	1,194	5,455
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	2	1	1	2	2	8	1,074	1,000	1,061	1,126	1,194	5,455
17		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	Unit	1	1	1	1	1	5	2,366	500	531	563	597	4,557
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1	5	2,366	500	531	563	597	4,557
18		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	Unit	1	1	1	1	1	5	1,728	500	531	563	597	3,919
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1	5	1,728	500	531	563	597	3,919
19		Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	1	1	2	6	410	410	435	462	490	2,206
	1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	1	1	2	6	410	410	435	462	490	2,206
20		Gaji dan Tunjangan DJPI	Layanan	1	1	1	1	1	5	29,714	26,292	27,896	29,597	31,403	144,902
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	29,714	26,292	27,896	29,597	31,403	144,902
21		Operasionalisasi Kantor DJPI	Layanan	1	1	1	1	1	5	15,540	20,802	22,071	23,417	24,846	106,676
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	5	15,540	20,802	22,071	23,417	24,846	106,676
PELAKSANA: Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Opersionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Opersionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Opersionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Opersionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :													

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)										44,113	45,113	19,399	0	0	135,693
		OUTPUT KEGIATAN :													
1		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran BLU PPDPP	Unit	1	1	1	0	0	3	100	100	0	0	0	303
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	0	0	3	100	100	0	0	0	303
2		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLU PPDPP	Unit	1	1	1	0	0	3	400	400	0	0	0	1,212
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	0	0	0	3	400	400	0	0	0	1,212
3		Gaji dan Tunjangan BLU PPDPP	Layanan	1	1	1	0	0	3	23,290	29,290	8,034	0	0	82,749
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	0	0	0	3	23,290	29,290	8,034	0	0	82,749
4		Operasionalisasi Kantor BLU PPDPP	Layanan	1	1	1	0	0	3	16,869	13,844	11,365	0	0	44,816
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Layanan	1	1	1	0	0	3	16,869	13,844	11,365	0	0	44,816
5		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BLU PPDPP	Layanan	1	1	1	0	0	3	3,455	1,480	0	0	0	6,615
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Layanan	1	1	1	0	0	3	3,455	1,480	0	0	0	6,615
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:															

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	59,79	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,328	3,127,655
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			%	100	100	100	100	100	100						
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :															
1		Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,328	3,127,655
KEGIATAN 1: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,328	3,127,655
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :															
1		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	50	50	50	100	100	100	1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
2		Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	50	50	50	0	0	0	27,840	27,840	28,675	0	0	84,355
KOORDINATOR : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan															
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan										1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
OUTPUT KEGIATAN :															
1		Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	5	5	5	23	3,250	3,250	7,100	7,760	8,486	29,846
1		Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	2,500	1,500	4,400	4,840	5,324	18,564
2		Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	2	8	750	1,000	2,200	2,420	2,662	9,032
3		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	0	750	500	500	500	2,250
2		NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	2	3	1	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	2	3	1	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782
3		Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	2	2	6	30	44	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	2	2	6	30	44	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
4		Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	0	0	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343
	1	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	-	-	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343
5		Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000
		SSB (BA.999.07)	Rumah Tangga	175,000	0	0	0	0	175,000	4,657,982	5,969,486	4,930,376	4,865,899	4,804,866	25,228,609
		SBUM (BA.999.07)	Rumah Tangga	263,000	157,500	200,000	220,000	220,000	1,060,500	1,064,000	945,000	1,200,000	1,320,000	1,320,000	5,849,000
6		Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,500	5,000	5,000	0	0	14,500
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,500	5,000	5,000			14,500
7		Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100
		SMF (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000						
		Tapera (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	50.000	75.000	100.000	10.000	7.251	242.251						
	2	FLPP (BA.999.03)	Rumah Tangga	0	0	0	220.000	220.000	440.000	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100
PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)										27,840	27,840	28,675	0	0	84,355
	OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		Fasilitasi Penyaluran FLPP	Layanan	3	3	0	0	0	6	8,550	5,600	0	0	0	19,918
	1	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	Laporan	2	2	0	0	0	4	5,500	3,550	0	0	0	12,707
	2	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan	Lembaga	30	30	0	0	0	60	1,500	1,500	0	0	0	4,545
	3	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	0	0	900,000	1,550	550	0	0	0	1,118
		FLPP (BA.999.03)	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	0	0	900,000	9,000,000	12,000,000	14,500,000	0	0	69,500,000
2		Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Layanan	3	2	3	0	0	12	2,354	1,436	0	0	0	5,269
	1	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan	Layanan	3	2	3	0	0	12	2,354	1,436	0	0	0	5,269
3		Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan	Layanan	40	45	45	0	0	220	2,788	2,788	0	0	0	8,447
	1	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan	Layanan	40	45	45	0	0	45	2,788	2,788	0	0	0	8,447
4		Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Layanan	45	45	45	0	0	225	1,355	1,115	0	0	0	3,618
	1	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Layanan	45	45	45	0	0	225	1,355	1,115	0	0	0	3,618
5		Teknologi dan Informasi Bantuan Pembiayaan Perumahan	Layanan	1	1	1	0	0	5	1,800	1,800	0	0	0	5,454
	1	Jumlah Pelayanan Sistem, Teknologi, dan Informasi Pembiayaan Perumahan	Layanan	1	1	1	0	0	5	1,800	1,800	0	0	0	5,454
6		Pendayagunaan Database Bantuan Pembiayaan Perumahan	Layanan	2	2	2	0	0	10	1,000	1,000	0	0	0	3,030
	1	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	Layanan	2	2	2	0	0	10	1,000	1,000	0	0	0	3,030
7		Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Layanan	1	1	1	0	0	5	2,900	2,900	0	0	0	8,787
	1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	Layanan	1	1	1	0	0	5	2,900	2,900	0	0	0	8,787
8		Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	3	3	3	0	0	15	1,500	2,600	0	0	0	6,778

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	3	3	3	0	0	15	1,500	2,600	0	0	0	6,778
9		Publikasi dan Kehumasan	Layanan	2	2	2	0	0	10	3,135	6,144	0	0	0	15,607
	1	Jumlah Pelaksanaan Publikasi dan Kehumasan	Layanan	2	2	2	0	0	10	3,135	6,144	0	0	0	15,607
10		Pengelolaan Aset BLU	Layanan	3	3	3	0	0	15	200	200	0	0	0	606
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLU	Layanan	3	3	3	0	0	15	200	200	0	0	0	606
11		Hukum dan Kepatuhan	Layanan	1	1	1	0	0	5	260	260	0	0	0	788
	1	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	Layanan	1	1	1	0	0	5	260	260	0	0	0	788
12		Pengawasan Internal	Layanan	24	24	24	0	0	120	800	800	0	0	0	2,424
	1	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan	24	24	24	0	0	120	800	800	0	0	0	2,424
13		Pembinaan Manajemen	Layanan	2	2	2	0	0	10	1,197	1,197	0	0	0	3,627
	1	Pembinaan Manajemen	Layanan	2	2	2	0	0	10	1,197	1,197	0	0	0	3,627

Lampiran 3 Indikasi Proyek KPBU
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2020-2022

Sektor	2020		2021		2022	
	Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
Sumber Daya Air	-	-	-	-	Bendungan Bodri	1.125.933.483.000
					Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW – NTB	170.023.000.000
					Daerah Irigasi Komering	1.658.000.000.000
					Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok – NTB	2.420.000.000.000
					PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji – Sumatera Selatan	1.740.000.000.000
Jalan dan Jembatan	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau	585.300.000.000	Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat	15.375.000.000.000	Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (segmen Mamberamo-Elelim)	3.116.460.000.000

Sektor	2020		2021		2022	
	Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
	Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci	26.150.000.000.000	Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung	8.947.000.000.000	Jalan Akses Exit Toll	7.900.000.000.000
	Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF)	2.920.000.000.000	Jalan Tol Semanan-Balaraja	17.680.000.000.000	Jalan Tol Cilacap - Yogyakarta	53.777.000.000.000
	Jalan Tol Semarang Harbour	12.130.000.000.000	Jalan Tol Kediri-Tulungagung	10.490.000.000.000	Jalan Tol Demak - Tuban	56.580.000.000.000
	Penggantian Dan/Atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa	2.336.000.000.000	Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg	18.620.000.000.000	Jalan Tol Ngawi - Babat	16.830.000.000.000
	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	19.360.000.000.000	Jalan Tol Akses Patimban	8.480.000.000.000	Jalan Tol Jember - Lumajang	7.400.000.000.000
			Jalan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir-Ulujami	21.565.000.000.000	Jalan Tol Jember - Situbondo	10.290.000.000.000
			Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	57.590.000.000.000	Jalan Tol Tulungagung - Kepanjen	14.520.000.000.000
			Jalan Tol Malang-Kepanjen	9.954.000.000.000	Jembatan Tanah Bumbu - Pulau Laut	2.460.000.000.000
					Jembatan Muna - Buton	8.300.000.000.000

Sektor	2020		2021		2022	
	Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
Perumahan	-	-	-	-	Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	587.786.000.000
					Rumah Susun Karawang Spuur	652.264.000.000
Permukiman	SPAM Regional Jatiluhur I	1.675.127.000.000	TPPAS Legok Nangka	4.000.000.000.000	Pendampingan Transaksi SPAM Hilir DKI Jakarta (BtoB)	30.500.000.000.000
	SPAM Karian Serpong	2.432.662.075.279			Pendampingan SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang (BtoB)	190.000.000.000
	SPAM Kota Pekanbaru	499.948.424.101				

**Lampiran 3 Indikasi Proyek KPBU
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2023-2024**

Sektor	Tahapan KPBU	2023		2024	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
Sumber Daya Air	Perencanaan	Daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh	4.168.273.000.000	DI Jambo Aye, Aceh	263.000.000.000
		PLTM Temef, NTT	55.000.000.000		
		PLTM Karalloe, Sulawesi Selatan	126.680.000.000		
		Bendungan dan PLTA di Papua	18.290.000.000.000		
	Penyiapan	Bendungan Bodri, Jawa Tengah	2.073.000.000.000	DI Jambo Aye, Aceh	263.000.000.000
		DI Lhok Guci, Aceh	4.168.273.000.000	DI Lhok Guci, Aceh	4.168.273.000.000
		PLTM Jenelata, Sulawesi Selatan	134.210.000.000	PLTM Jenelata, Sulawesi Selatan	134.210.000.000
		Bendungan Merangin, Jambi	7.853.464.000.000	Bendungan Merangin, Jambi	7.853.464.000.000
		PLTA Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000	Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok (Unsolicited)	1.578.844.000.000

Sektor	Tahapan KPBU	2023		2024	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
		Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok (Unsolicited)	1.578.844.000.000	Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering (Unsolicited)	1.651.319.000.000
		Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering (Unsolicited)	1.651.319.000.000	PLTA Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000
		PLTM Temef, NTT	55.000.000.000	PLTM Temef, NTT (FS, Penugasan BUMN)	39.024.000.000
		PLTM Karalloe, Sulawesi Selatan	126.680.000.000	PLTM Karalloe, Sulawesi Selatan (FS, Penugasan BUMN)	84.043.000.000
	Transaksi	Bendungan dan PLTA di Papua	18.290.000.000.000	PLTM Way Sekampung, Lampung (FS, Penugasan BUMN)	121.774.000.000
				PLTM Cipanas, Jawa Barat (FS, Penugasan BUMN)	154.125.000.000
				PLTM Pamukkulu, Sulawesi Selatan (FS, Penugasan BUMN)	58.174.000.000
		PLTM Jenelata, Sulawesi Selatan	134.210.000.000	DI Lhok Guci, Aceh	4.168.273.000.000
		PLTA Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000	Bendungan Merangin, Jambi	7.853.464.000.000

Sektor	Tahapan KPBU	2023		2024	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
				PLTM Way Sekampung, Lampung (FS, Penugasan BUMN)	121.774.000.0000
				PLTM Karalloe, Sulawesi Selatan (FS, Penugasan BUMN)	84.043.000.000
Jalan dan Jembatan	Perencanaan			-	-
	Penyiapan	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis	37.147.000.000.000	Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang	8.160.000.000.000
		Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik	23.332.000.000.000	Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari)	5.695.000.000.000
		Jalan Tol Demak-Tuban	49.607.000.000.000	Jalan Tol Pluit-Bandara	9.280.000.000.000
		Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	22.840.000.000.000	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5.470.000.000.000
		Fly Over Sitinjau Lauik	2.806.450.387.685	Jalan Tol Caringin-Cisarua	8.083.000.000.000

Sektor	Tahapan KPBU	2023		2024	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
				Jalan Tol Malang - Kepanjen	10.040.000.000.000
				Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik	23.332.000.000.000
				Cilegon-Anyer	8.222.000.000.000
	Transaksi			Fly Over Sitinjau Lauik	2.806.450.387.685
Perumahan	Perencanaan	Rusun Kota Surabaya-Medokan Ayu	267.000.000.000		
	Penyiapan	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	797.000.000.000	Rusun Kota Surabaya-Medokan Ayu	189.227.000.000
		Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi	143.000.000.000	Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi	157.332.000.000
		Rusun Hankam WP 1A (60 tower)	14.990.000.000.000	Rusun Desa Besar Medan	498.000.000.000
		Rusun North Government WP 1A (6 tower)	1.670.000.000.000	Rusun Daan Mogot	717.000.000.000
	Transaksi	Rusun Cisaranten Bina Harapan	616.284.154.002	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	1.315.662.000.000

Sektor	Tahapan KPBU	2023		2024	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
		Rusun Karawang Spuur	209.033.928.793	Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi	161.850.000.000
				Rusun Cisaranten Bina Harapan	653.710.000.000
				Rusun Karawang Spuur	272.474.490.883
Permukiman	Perencanaan			SPAM Kota Pontianak (B to B)	Identifikasi
	Penyiapan	Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Singdangheula	3.500.000.000.000	Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Singdangheula	3.500.000.000.000
		SPAM Regional Ayung I	1.372.000.000.000	SPAM Regional Ayung I	1.372.000.000.000
		SPAM Bitung	250.000.000.000	SPAM Bitung	250.000.000.000
		SPAM Batam-Bintan	14.438.858.000.000	SPAM Regional Bimatara	658.000.000.000
		SPAM Regional Jatigede	4.200.000.000.000	SPAM Regional Bimatara	658.000.000.000
		SPAM Regional Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II	9.740.000.000.000		

Sektor	Tahapan KPBU	2023		2024	
		Nama Proyek	Investasi (Rp)	Nama Proyek	Investasi (Rp)
		SPAM Regional Sinumbra	1.060.867.000.000		
	Transaksi	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB)	1.940.000.000.000	SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	9.740.000.000.000
				SPAM Regional Sinumbra	1.060.867.000.000



DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN



Pemb_InfraPUPR



Pembiayaan_Infrastruktur



Pembiayaan Infrastruktur



Pembiayaan Infrastruktur PUPR



<http://pembiayaan.pu.go.id>